

Jurnal Al-Bayan:

Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah

Vol. 26 No. 2 Juni - Desember 2020, 215 – 249

DOI. 10.22373/albayan.v27i1.7107

**THE IDEAL FORMAT FOR THE IMPLEMENTATION
OF ISLAMIC DA'WAH TO STRENGTHEN THE
ENFORCEMENT OF ISLAMIC SHARIA IN ACEH
(A STUDY OF THE VIEWS OF DAYAH ISLAMIC
SCHOLARS)**

Teuku Zulkhairi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: teuku.zulkhairi@ar-raniry.ac.id

Abstract

This paper explores the views of dayah scholars towards the ideal format of the implementation of Da'wah Islamiyah in order to strengthen the enforcement of Islamic Sharia in Aceh. The implementation of Islamic Sharia which has been running for a dozen years is need to be supported by the massive implementation of Da'wah Islamiyah because the da'wah calls on people to do what is right and leave evil. To achieve this goal, the implementation of da'wah must be in accordance with the advice of Islam itself, both the delivery method, material, criteria for preaching and the involvement of various elements to ensure the successful implementation of da'wah. This research takes a study of the views of the dayah scholars because it considers that the scholars are a very influential element in Acehnese society. The method of writing this article uses a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with a number of dayah scholars and preachers in Aceh. The results of this study describe the responses and views of Islamic dayah scholars in Aceh to the methods and strategies of Da'wah Islamiyah that can be used in order to strengthen the enforcement of Islamic Sharia in Aceh. The results of this study can be useful for the formulation of policies of the Aceh government, especially in compiling policies on the implementation of Da'wah Islamiyah so that the process of implementing the Islamic Shari'ah that is running can reach the goals that are aspired.

Keywords : *Islamic Shari'ah, Da'wah Islamiyah, ulama dayah*

Abstrak

Tulisan ini mengupas pandangan ulama dayah terhadap format ideal pelaksanaan Dakwah Islamiyah dalam rangka memperkuat penegakan Syari'at Islam di Aceh. Implementasi Syari'at Islam yang telah berjalan belasan tahun dianggap perlu didukung oleh pelaksanaan Dakwah Islamiyah secara massif. Sebab, dakwah menyeru manusia untuk mengerjakan yang ma'ruf dan meninggalkan kemungkaran. Namun untuk mencapai tujuan ini, maka pelaksanaan dakwah harus sesuai dengan anjuran Islam itu sendiri. Baik metode penyampaian, materi, kriteria pendakwah, hingga perlunya keterlibatan berbagai elemen untuk menyukseskan pelaksanaan dakwah. Maka penelitian ini mengambil studi pandangan ulama dayah karena menimbang bahwa para ulama adalah elemen yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat Aceh. Metode penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah ulama dayah dan pendakwah di Aceh. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan respons dan pandangan ulama dayah di Aceh terhadap format ideal dan strategi Dakwah Islamiyah yang dapat digunakan dalam rangka memperkuat penegakan Syari'at Islam di Aceh. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk perumusan kebijakan pemerintah Aceh khususnya dalam menyusun kebijakan tentang pelaksanaan Dakwah Islamiyah sehingga proses implementasi Syari'at Islam yang sedang berjalan dapat sampai kepada tujuan yang dicita-citakan.

Kata Kunci: dakwah Islamiyah, ulama dayah, syari'at Islam

Pendahuluan

Pelaksanaan dakwah Islamiyah adalah kebutuhan mutlak dalam dalam agama Islam. Apalagi dimana Provinsi Aceh menjadikan Syari'at Islam sebagai hukum resmi. Dakwah senantiasa dibutuhkan karena manusia selalu membutuhkan hidayah, bimbingan dan pembinaan spiritual. Sementara itu, aktivitas dakwah selalu menyeru dan mengingatkan manusia pada nilai-nilai kebaikan dan amal-amal mulia serta hal-hal yang dapat meninggikan derajat mereka, memperbaiki keadaan mereka, dan menjauhkan mereka dari kesalahan dan

kejahatan.¹ Tanpa dakwah, manusia akan kehilangan sentuhan agama yang menyebabkan kehilangan arah dan tujuan perjalanan hidup di dunia sehingga terjadilah berbagai pelanggaran Syari'at Islam. Tanpa dakwah, manusia akan lepas dari nilai-nilai *rabbaniyah* sehingga kemudian dikepong oleh nilai-nilai hidup yang berlandaskan pada materialisme dan hedonisme yang bermuara pada pengingkaran atas Zat Allah Swt. Bahkan tanpa dakwah, manusia akan menjauh dari agama, yang ma'ruf dianggap mungkar, dan yang mungkar dianggap ma'ruf.

Realitas yang bisa disaksikan di setiap zaman, pembangkangan atas perintah Allah Swt terjadi di berbagai dimensi kehidupan dan dilakukan di semua level manusia. Ini menandakan bahwa dakwah Islamiyah harus terus berjalan dan agar terus menerus diperkuat jangkauannya sehingga cahaya Islam terus menyinari jiwa manusia. Jika dakwah melemah dan tanpa strategi, maka penyimpangan-penyimpangan terhadap Syari'at Islam dipastikan akan terjadi lebih massif. Secara logika, adanya dakwah saja namun pengingkaran atas perintah Allah tetap terjadi, lalu bagaimana jika dakwah tidak ada, melemah, dan apalagi berhenti? Tentu angka penyimpangan akan semakin meningkat. Maka tugas dakwah Islamiyah merupakan tugas para Rasul, karenanya ia merupakan tugas yang mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, pahalanya di sisi Allah Swt sangat besar dan sekaligus merupakan sumber yang melimpah bagi perbekalan, ketakwaan dan keimanan.²

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh,

¹ Syaikh Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, terj. Abu Ridho dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), hal: 128

² Syaikh Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah.....*, hal: 127

dan berkata: “*Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?*” (QS. Fushshilat: 33).

Oleh sebab itu, dengan Aceh yang sudah lebih dari dua dekade silam berjuang mewujudkan pelaksanaan Syari’at Islam secara kaffah dalam setiap dimensi kehidupan, maka penguatan dakwah Islamiyah adalah sebuah kebutuhan mutlak dan mendesak. Apalagi, realitasnya, pelanggaran atas hukum-hukum Syari’at masih terus terjadi. Dalam konteks inilah dipahami bahwa gerakan dakwah dan Syari’ah tidaklah dapat dipisahkan. Ibarat kereta api dengan masinis, tidak mungkin kereta api dapat berjalan tanpa dipandu oleh masinis. Maka demikian pula dengan Syari’at Islam di Aceh, sulit untuk dapat berjalan secara kaffah dan serentak tanpa gerakan dakwah yang bersahaja, terencana, bermekanisme, taktik dan strategi.³

Terkait dengan praktek pelanggaran Syari’at Islam, kita bisa menyaksikan sendiri perjalanan Aceh sebagai sebuah bangsa dewasa ini. Di balik hiruk pikuk diskursus Syari’at Islam, pelanggaran-pelanggaran atas nilai-nilai Islam terus terjadi. Kasus-kasus pembunuhan masih senantiasa menghiasa media massa kita yang menunjukkan bahwa pelakunya tidak memiliki hati nurani dan rasa takutnya kepada Allah, padahal Islam secara tegas melarang penghilangan nyawa manusia tanpa hak. Lalu perilaku Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) nampaknya juga kian mentradisi, padahal Islam dengan tegas melarang perbuatan mungkar tersebut. Berbagai kemaksiatan lainnya juga tetap terjadi seperti perzinaan dimana media massa kita tidak henti mengkabarkan kasus-kasus mesum, lalu bayi-bayi hasil perzinaan yang dibuang. Praktek aborsi dan bahkan juga ditemukan kasus gay yang menimpa masyarakat kita akut. Kehampaan jiwa dan kekosongannya dari aspek agama ini juga telah menyebabkan merebaknya praktek haram

³ Jasafat dkk, *Dakwah, Media Aktualisasi Syari’at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Prov. Aceh, 2011), hal: 102

ribawi juga masih terus dipraktikkan oleh dunia perbankan umumnya dan bahkan sepertinya belum ada upaya maksimal untuk menghentikannya.

Bahkan, yang juga sangat ironis adalah semakin merajalelanya Narkoba (Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya) di Aceh sehingga hal ini menjadi bahaya terbesar yang paling mematikan bagi masyarakat dan pemuda kita. Padahal, bukan saja obat-obatan terlarang tersebut haram dari perspektif agama, namun juga terlarang dari perspektif hukum negara. Bahkan, yang lebih tragis, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Mahdi Effendi, Aceh saat ini untuk penyalahgunaan narkoba menduduki peringkat 8 nasional dengan penyalahgunaan narkoba sebanyak 60.486 (jiwa dari total 5.024. 300). Bahkan narkoba jenis ganja Aceh menjadi nomor 1.⁴

Mereka telah melalaikan hakikat bahwa di sana ada Tuhan yang telah menciptakan mereka dan mengawasi semua gerak-geriknya. Lalai mengingat dan mentaati Allah. Lalai terhadap berbagai anugerah dan nikmatnya yang diberikan kepada mereka. Lalai terhadap rahasia keberadaan dan misi mereka dalam kehidupan, sebagaimana mereka lalai terhadap masa depan yang pasti akan mereka tuju. Dan lalai terhadap perhitungan dan pembalasan amal yang akan mereka alami. Kita melihat banyak di antara mereka yang seakan akal mereka telah terbelengkalai, mata mereka seakan buta, dan telinga mereka seakan tuli sehingga mereka menjadi seperti binatang bahkan lebih sesat.⁵

Di lain sisi, fenomena ini semakin diperparah dengan tampilan sejumlah berita di media massa cetak, online dan elektronik yang menampilkan pola hidup dan budaya yang sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Pada saat yang bersamaan,

⁴Berita dikutip dari situs nusantaranews.co. *Judul: Aceh Peringkat Ke-8 Nasional Dalam Penyalahgunaan Narkoba*,. Diakses 7 Oktober 2017.

⁵ Syaikh Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*....., hal: 328-329

Aceh juga dihadapkan pada serangan-serangan pemikiran (*ghazwul fikri*) yang kian hari terasa semakin dahsyat, seperti propaganda liberalisme dan sekularisme yang merusak Syari'at Islam dan pandangan hidup (*world view*) umat Islam. Sebab, jika Syari'at Islam diturunkan oleh Allah Swt untuk mengatur kehidupan manusia agar selamat di dunia dan akhirat, maka liberalisme dan sekularisme justru sebaliknya, yaitu ingin menjauhkan manusia dari kehidupan yang berlandaskan aturan Syari'at Islam. Pada sisi lain, kerisauan umat Islam juga terjadi karena gencarnya upaya kristenisasi yang semakin marak saja di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Aceh.⁶ Tidak sampai di sini, Aceh juga dihadapkan pada “serbuan” aliran sesat yang datang dan muncul silih berganti. Dari aliran Laduni, hingga Millata Abraham (yang kemudian berganti nama menjadi Gafatar) dan aliran-aliran sesat lainnya yang kemudian mendorong fatwa sesat dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh.

Masalah lainnya juga muncul dimana dalam hal keagamaan di Aceh mulai berubah sangat signifikan pasca tsunami di Aceh. Pasca tsunami hampir semua aliran di dunia, bahkan golongan non-Muslim masuk ke Aceh dengan misi masing-masing.⁷ Muncul aliran-aliran baru yang ‘asing’ bagi masyarakat Aceh disinyalir telah membuka celah terjadinya konflik. Sebab, banyaknya pendatang sekaligus membawa aliran baru mampu mengubah tatanan sosio-kultural dan sosio-religi masyarakat Aceh. Dalam tatanan sosio-kultural masyarakat mengalami berbagai perubahan, di antaranya dalam adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Dalam tatanan sosio-religi masyarakat mengalami berbagai perubahan dalam tata cara ibadah, pendidikan, pergaulan, dan dakwah.

⁶ Jasafat dkk, *Dakwah, Media Aktualisasi...*, hal: 100

⁷ Marzuki, *Berebut Masjid: Resistensi Dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang*, Jurnal PENAMAS, Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, hal: 367

Perubahan-perubahan ini terjadi sangat halus dan hampir tidak disadari. Ketika masyarakat lokal menyadari, mereka harus berjuang keras melawan dan menjaga tatanan sosio-kultural dan religi di lingkungan mereka. Inilah yang kemudian menjadi akar terjadinya konflik internal masyarakat Islam di Aceh, ketika pengamalan Islam aliran masyarakat lokal telah digantikan dengan pengamalan Islam model baru.⁸

Maka fenomena di atas merupakan pertanda bahwa di satu sisi, aktivitas dakwah di Aceh membutuhkan aturan-aturan yang mengikat bagaimana prosedur dan etika menjalankan praktik dakwah di Aceh. Diharapkan bahwa penyelenggaraan dakwah oleh sekelompok orang atau warga tidak justru menimbulkan perpecahan di masyarakat. Sebab praktek dakwah itu sejatinya mampu menghadirkan persatuan bagi umat Islam.

Di sisi lain, pelaksanaan dakwah harus berlangsung secara komprehensif, meliputi semua segmentasi masyarakat Aceh. Maka dalam konteks inilah, para ulama dayah di Aceh sebagai pemegang wacana keagamaan di Aceh semestinya diketahui pandangan mereka tentang penyelenggaraan dakwah yang ideal di Aceh. Para ulama sebagai pengayom masyarakat Aceh adalah elemen penting yang senantiasa hidup membaaur dengan masyarakat. Mengetahui pandangan mereka tentang format ideal dan strategi penyelenggaraan dakwah akan memudahkan pola dakwah Islamiyah yang dapat dilaksanakan sehingga kegiatan dakwah Islamiyah dapat mencapai target atau hasil yang maksimal.

Metode Penelitian

Berdasarkan objek kajiannya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara

⁸ Marzuki, *Berebut Masjid: Resistensi Dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang*, Jurnal PENAMAS, Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016, hal: 361

mendalam. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan format ideal dan strategu pelaksanaan dakwah Islamiyah dalam penguatan Syari'at Islam di Aceh dalam pandangan ulama dayah. Diharapkan nantinya dapat menjelaskan serta menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana pandangan ulama dayah di Aceh terhadap pelaksanaan dakwah yang ideal dalam menyukkseskan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Disamping itu, penelitian kualitatif ini membentuk hipotesis-hipotesis lama yang relevan dengan fokus permasalahan suatu penelitian dan pada akhirnya dapat membentuk teori-teori atau mempertegaskan teori-teori yang ada.⁹ Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sebanyak enam ulama dan teungku dayah di Aceh yang dipilih dengan teknik *purposif sampling*. Empat di antaranya adalah ulama kharismatik. Sementara dua lainnya yaitu teungku dayah biasa namun berprofesi sebagai pendakwah. Sampel yang terpilih dianggap dapat memberikan gambaran umum tentang pandangan ulama dayah di Aceh terhadap format ideal dan strategi pelaksanaan dakwah Islamiyah di Aceh. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil Penelitian

Format Ideal Pelaksanaan Dakwah Islamiyah Untuk Memperkuat Penegakan Syariat Islam

Terjadinya pelanggaran atas hukum-hukum Syari'at Islam menandakan bahwa penguatan dakwah Islamiyah secara massif, sistematis dan terencana adalah kebutuhan mutlak. Di sinilah peran fundamental dakwah Islam diharapkan bisa memperkuat seruan kepada masyarakat untuk terus berada di

⁹ Koenjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 25

atas jalan Iman dan Islam, dengan cara mengamalkan perintah-perintah Allah Swt dan RasulNya dan meninggalkan segala larangan.

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)” (QS. Luqman: 17).

Dakwah yang bermakna ajakan, seruan, undangan atau panggilan¹⁰ mempunyai peran penting dalam mengaktualisasikan Syari’at Islam di Aceh. Tentunya jika gerakan dakwah tersebut dapat berjalan dengan teratur rapi, karena setiap gerakan yang dilakukan secara teratur dan berencana maka akan mendapatkan hasil yang baik pula.¹¹ Artinya, diperlukan gerakan dakwah yang massif dan sistematis untuk menyadarkan manusia untuk tidak melakukan pelanggaran atas Qanun-qanun Syari’at Islam khususnya, dan perintah Allah Swt dan RasulNya lainnya yang tidak termaktub dalam qanun. Maka dakwah Islamiyah diharapkan dapat menjadi “jembatan” yang menghubungkan agenda implementasi Qanun-qanun Syari’at Islam dengan manusia sebagai objek hukum. Jadi, kegiatan dakwah Islamiyah di Aceh juga diharapkan dapat menggiring masyarakat untuk patuh pada Qanun-qanun Syari’at Islam yang telah diberlakukan, seperti Qanun Jinayat dan qanun-qanun lainnya.

¹⁰ Misbach Malim, *Dinamika Dakwah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, (Jakarta: Media Dakwah, 2005), hal: 2

¹¹ Jasafat dkk, *Dakwah, Media Aktualisasi Syari’at Islam.....*, hal: 101

Bahkan, dakwah Islamiyah diharapkan bukan hanya menggugah kesadaran spiritual masyarakat untuk meninggalkan perilaku yang melanggar Syari'at Islam, namun juga menggiring mereka untuk semakin konsisten mendekatkan diri kepada Allah Swt melalui serangkaian amalan-amalan baik yang bersifat wajib maupun amalan sunat. Aktivitas dakwah yang maju akan membawa pengaruh bagi terhadap kemajuan agama. Sebaliknya, aktivitas dakwah yang lesu akan berakibat pada kemunduran agama. Karena adanya hubungan timbal balik seperti itu, maka dapat dimengerti jika agama Islam meletakkan kewajiban dakwah di atas pundak setiap pemeluknya.¹²

Allah Swt berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS: Ali Imran: 110).

Secara historis, Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia adalah hasil dari kegiatan dakwah dengan berbagai metodenya, baik dakwah *bi al-ḥāl*, maupun dakwah *bi al-lisān*. Ini menandakan bahwa kegiatan dakwah memiliki tingkat urgensi yang tinggi dalam memperluas dan memperkuat

¹² Maimun Yusuf, *Strategi Dakwah Bagi Masyarakat Gampong*, Jurnal Mentari Unmuha, Vol. 12, No 1, 2009, hal: 30

pengaruh ajaran Islam. Peranan dakwah akan lebih intens lagi dalam kehidupan masyarakat karena dakwah dalam hal ini berfungsi untuk menata kehidupan yang agamis menuju terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis sesuai dengan kerangka masyarakat ideal dalam Islam.¹³

Perlunya Izin Kegiatan Dakwah dan Keteladanan Pendakwah

Izin Pelaksanaan Dakwah Islamiah

Dari sejumlah ulama yang menjadi narasumber penelitian ini, sejumlah di antaranya mengatakan perlunya sertifikasi atau izin bagi pendakwah. Tujuannya agar kegiatan dakwah si penceramah tidak menjadi ajang untuk caci maki dan lucu-lucuan. Hal ini misalnya seperti pendapat Tgk H. Hasanoel Basry (Abu Mudi), Pimpinan Dayah Mudi Mesra Samalanga.¹⁴ Menurut Abu Mudi, Khatib-Khatib dan penceramah lainnya tidak boleh dari sembarangan orang. Beratnya tugas khatib sehingga menurut Abu Mudi tidak bisa siapa saja bisa jadi khatib. Abu Mudi mengusulkan agar harus adanya perizinan bagi khatib. Dan yang ada izin inilah yang diundang untuk bekrhutbah atau berceramah. Abu Mudi mengatakan:

“Realitas selama ini kegiatan dakwah banyak kasus yang penceramahnya cenderung berdasarkan suka-suka warga yang mengundang. Maka sering penceramah itu seperti orang yang *meukat ubat* (penjual obat) dan hikayat, amburadul. Efeknya, penyampaian dakwah hanya

¹³ M. Ali Azizi, *Ilmu Dakwah*, Edisi I, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal: 37

¹⁴ Wawancara dengan Abu Mudi berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2017 di Ruang Kantor Dayah Mudi Mesra Samalanga.

menurut kemauan si penceramah, sehingga tidak jarang justru tidak mengarah ke arah pendidikan Islam.

Pendapat ini juga diutarakan Tgk H. Sirajuddin.¹⁵ Menurut Tgk Sirajuddin, para penceramah umum jangan hanya memikirkan enak didengar oleh audiensi seperti yang terjadi selama ini, sehingga lucu-lucuan itu tidak jarang justru bisa menjurus ke penyimpangan Aqidah.

Tgk Sirajuddin juga mengusulkan, agar penceramah-penceramah keagamaan jangan dari “*ureung meukat ubat*” (penjual obat). Seorang penceramah yang diundang warga hendaknya harus diakui reputasinya dalam bidang keagamaan. Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab¹⁶, seorang ulama dayah kharismatik di Bireuen mengatakan, terkait dengan perizinan dan atau sertifikasi da’i, menurut beliau, izin boleh diberikan kepada pendakwah dari luar kalau ia sesuai dengan qanun-qanun syari’at Islam di Aceh, mazhab masyarakat Aceh dan aturan-aturan lainnya. Dan setelah itu, setiap pendakwah juga harus memperhatikan *mau’izhah hasanah* supaya tidak merusak nilai dakwah.

Sementara itu, terkait sertifikasi penceramah, Abu Mudi memberi contoh, di Malaysia penceramah telah lama di atur. Tidak bebas sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam kegiatan dakwah bisa diantisipasi sejak di awal. Pada akhirnya, warga akan selalu dalam kedamaian dan terisi ruhiyah mereka dengan nilai-nilai pendidikan yang membangun dan mencerdaskan. Namun, ada juga narasumber yang berpendapat penyelenggaraan dakwah oleh masyarakat pada dasarnya tidak

¹⁵ Wawancara dengan Tgk. H. Sirajuddin Hanafi berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2017 di Komplek Dayah Babussalam Matangkuli Aceh Utara.

¹⁶ Wawancara dengan Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2017 di Rumahnya di Komplek Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Jeunieb, Bireuen.

perlu surat izin. Hal ini disampaikan oleh Tgk Amarduna Mustafa.¹⁷

Namun demikian, Tgk Amarduna sepakat bahwa tidak semua pendatang dari luar Aceh bisa dengan mudahnya berdakwah dan menyebarkan alirannya, sebab Aceh sudah ditetapkan dalam Qanun bahwa hanya dibolehkan Aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah dan Mazhab Fiqh yang empat. Dari penjelasan Tgk Amarduna, dapat disimpulkan bahwa untuk penyelenggaraan dakwah di Aceh oleh para penceramah yang sudah memiliki reputasi baik agar tidak terlalu ribet dengan perizinan. Jadi tujuan beliau agar kegiatan dakwah tidak justru menjadi sulit. Kendatipun demikian, Tgk Amarduna sepakat bahwa cacik maki tidak boleh dilakukan oleh seorang penceramah dalam kegiatan dakwahnya. Sebagai juga seorang penceramah terkenal, Tgk Amarduna Mustafa sangat tidak setuju dengan adanya cacik maki dalam kegiatan dakwah. Ia juga mengusulkan agar ceramah atau dakwah Islamiyah harus tegas, tidak pandang bulu atas nama hukum dan kebenaran.

Perizinan Lembaga Dakwah dan Pendidikan

Lembaga pendidikan Islam dianggap sebagai juga lembaga dakwah. Sebab, proses dakwah di lembaga pendidikan Islam berlangsung dalam prosesi pendidikannya. Oleh sebab itu, dimana lembaga pendidikan Islam ini berperan dalam mendidik generasi, maka ia harus dipastikan agar sesuai dengan target-target pendidikan Islam di Aceh berdasarkan Qanun-Qanun Syari'at Islam yang telah disahkan. Maka memperhatikan realitas di lapangan, Abu Mudi mengusulkan perlunya perizinan pemerintah untuk mendirikan Dayah, Balai Pengajian dan termasuk Taman Pengajian Alquran (TPA), termasuk perizinan penyelenggaraan ibadah Sulok. Sementara

¹⁷ Wawancara dengan Tgk Amarduna Mustafa berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2017 di Keude KUPI Matangkuli Aceh Utara

itu, terkait dengan pendirian lembaga dakwah dan lembaga pendidikan, menurut Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab boleh diberikan izin kalau si pendakwah dan kegiatan dakwahnya ini sesuai dengan qanun-qanun Aceh

Masukan perlunya perizinan dari Abu Mudi ini tentu saja bertujuan untuk memastikan agar institusi pendidikan yang didirikan di Aceh memenuhi kualifikasi layaknya sebuah lembaga pendidikan Islam, dan sesuai dengan agenda Syari'at Islam di Aceh dengan segala Qanun-qanunnya. Sementara soal perizinan penyelenggaraan kegiatan dakwah Islamiyah, menurut Tgk H Sirajuddin, pihak keamanan dalam memberi izin harus berkoordinasi dengan ulama seperti MPU dan institusi resmi lainnya. Terakhir, Abu Mudi juga mengusulkan agar pelaksanaan kegiatan *Sulok* juga harus ada izin. Tempat praktek amalan sulok Tariqat Naqsyabandiyah. Dalam hal ini dinas terkait yang menangani perkara ini harus berkonsultasi dengan Mursyid.

Pendakwah Harus Menjadi Teladan dan Diketahui Publik Reputasi Baik

Narasumber atas nama Tgk H. Sirajuddin Hanafi menyampaikan agar Seorang pendakwah harus sudah diketahui publik reputasi baiknya, atau *track record*. Hal semacam ini tentu beralasan mengingat dalam beberapa kasus di Aceh, setelah mengundang penceramah dari luar Aceh, kemudian diketahui ternyata memiliki aliran yang menyimpang secara Aqidah. Seperti diketahui, di Aceh dalam beberapa kasus terjadi keributan di masyarakat oleh karena dihadirkannya seorang penceramah yang baru beberapa waktu masuk Islam. Akibatnya, penyampaian materi dakwahnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Tgk H Sirajuddin juga menyampaikan, hendaknya para pendakwah itu sudah diketahui publik reputasinya dalam penguasaan ilmu keislaman.

Tgk H. Sirajuddin juga mengusulkan agar para penceramah dalam setiap ceramahnya bisa menjelaskan kesimpulan dari isi ceramahnya, agar jamaah bisa menyimpulkan secara lebih akurat. Pendapat seperti itu disampaikan Tgk. H. Muahammad Yusuf A. Wahab di Bireuen, beliau menegaskan agar dakwah jangan dijadikan sebagai ajang hiburan oleh si pendakwahnya.

Seorang narasumber, Tgk Muniruddin Kiran mengatakan pentingnya da'i menjadi teladan bagi masyarakat.¹⁸ Artinya bahwa tidak boleh menjadi atau diundang sebagai pendakwah seseorang yang dalam kesehariannya tidak bisa diteladani oleh masyarakat. Jadi, Da'i harus menjadi teladan. Tujuannya menurut Tgk Muniruddin yaitu agar masyarakat melihat bahwa apa yang disampaikan oleh da'i itu ada pada dirinya sendiri, maka dia harus mampu membuat orang menjadi berpetunjuk. Dan ini berlaku untuk seluruh da'i atau penceramah. Pemerintah menurut Tgk Muniruddin bisa mengontrol bagaimana standar da'i harus dimiliki oleh setiap da'i. Dalam hal ini, khusus da'i yang digaji oleh pemerintah, menurut Tgk Muniruddin, maka perekrutan da'i juga harus sesuai standar Islam.

Para juru dakwah tentu saja terikat oleh aturan-aturan Islam sehingga kegiatan dakwah yang dilakukannya tidak justru menimbulkan perpecahan di masyarakat, misalnya dengan cara tidak mempertajam perbedaan dalam urusan *khilafiyah fikh*, tidak menjadikan dakwah sebagai panggung hiburan yang membuka peluang nasihat agama menjadi bahan tertawaan masyarakat. Selain itu para da'i di Aceh tentu juga diharapkan untuk tidak materialistis (berdakwah demi uang) dan juga betul-betul memiliki keteladanan dalam perilaku, perkataan dan perbuatan sehingga masyarakat tidak hanya mendapat nasihat secara lisan, namun juga yang paling penting

¹⁸ Wawancara dengan Tgk. Muniruddin Kiran berlangsung pada tanggal 18 Oktober 2017 di Keude Samalanga, Kab. Bireuen. Beliau adalah pimpinan Dayah Babul 'ilmi di Kiran, Pidie Jaya.

adalah keteladanan nyata yang membuat mereka semakin terpicat dengan Islam.

Materi dan Strategi Penyampaian Dakwah Islamiyah

Di samping perlunya penguatan dakwah di atas realitas berbagai penyimpangan yang terjadi di semua level kehidupan, maka perumusan materi, strategi dan metode yang tepat dalam aktivitas dakwah yang bakal dikembangkan di Aceh adalah juga sebuah keniscayaan. Dalam konteks implementasinya, kegiatan dakwah dibebankan kepada setiap pribadi muslim dan juga kepada penguasa atau pemerintahan. Keterlibatan berbagai komponen masyarakat dan pemerintahan diharapkan dapat memperluas ekspansi dakwah serta cakupan dan jangkauannya. Sementara itu, aktivitas dakwah di Aceh juga harus memperhatikan berbagai aspek agar dakwah berjalan sukses. Setidaknya, aktivitas dakwah memperhatikan bagaimana idealnya seorang pelaku dakwah (da'i), kondisi penerima dakwah (*mad'u*), materi (*maddah*), media (*wasilah*), metode (*tharīqah*) dan efek (*atsar*) yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan dakwah.¹⁹

Bagi para da'i (baca: juru dakwah), setidaknya terdapat tiga bentuk metode dakwah yang lazim digunakan, yaitu: *Pertama*, metode *bil hikmah* (dengan cara bijaksana), yaitu dakwah yang dilakukan dai untuk menjelaskan doktrin-doktrin Islam sesuai dengan realitas yang ada dengan argumentasi logis dan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami *mad'u*. *Kedua*, metode *mau'izah hasanah* (dengan memberikan pelajaran yang baik), yaitu suatu metode dakwah yang berlangsung dalam bentuk bimbingan, pengajaran, kisah-kisah, berita gembira, peringatan, pesan-pesan positif yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, agar tercapai

¹⁹ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah.....*, hal: 21-34

keselamatan dunia dan akhirat.²⁰ *Ketiga*, metode *dakwah bil mujadalah* (berdiskusi, berdialog, tanya jawab dengan cara yang baik).²¹ Tentu, penggunaan metode-metode ini adalah berdasarkan kebutuhan lapangan dan objek dakwah.

Pentingnya seorang pendakwah memperhatikan strategi dalam melakukan kegiatan-kegiatan dakwah Islamiyah karena strategi dan metode akan menentukan hasil. Jika strategi dan metode tidak tepat, maka target dakwah tidak akan tercapai. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Swt dalam Alquran:

أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik”. [An Nahl:125].

Ayat ini menandakan bahwa tugas dakwah Islamiyah juga sepatutnya memperhatikan metode-metode penyampaiannya sehingga target dakwah bisa tercapai. Metode dakwah sebagai pendekatan (*approach*), yaitu berupa cara-cara yang dilakukan oleh seorang da'i untuk mengajak orang lain kepada suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang.²² Dari sini di-pahami, metode dakwah merupakan strategi maupun cara-cara yang dilakukan dai pada saat

²⁰ M. Arifin, *Psikologi Dakwah; Suatu Pengantar Studi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal: 21.

²¹ Lihat, Syekh Muhammad Abu Al Fatah Al Bayanuny, *Ilmu Dakwah: Prinsip dan Kode Etik Berdakwah Menurut Alquran dan As Sunnah*, terj. Dedi Junaedi (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal: 309-334.

²² Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hal: 43

berdakwah sehingga dakwah yang dilakukan efektif dan efisien.²³

Dari aspek media, wasilah proses dakwah tidak boleh lagi hanya memada dakwah *bi al-lisān* (mulut), tapi tentu saja harus diperkuat dengan dakwah *bi al-hāl* (perbuatan), *bi al-kitābah* (tulisan), *bi al-ḥikmah* dan seterusnya. Begitu juga terkait dengan langkah-langkah dakwah yang perlu diterapkan di Aceh, diharapkan diawali dari proses memperbaiki diri sendiri (*islahu an-nafs*), memperbaiki keluarga (*islahu al-usrah*), memperbaiki atau membimbing masyarakat (*islahu al-mujtama'*) hingga memperbaiki keadaan negara (*islahu al-balād*), sampai kemudian umat Islam menjadi guru bagi dunia (*ustaziyatul 'alam*).

Jadi, fungsi dakwah Islamiyah di Aceh diharapkan terus diperkuat dalam rangka meminimalisir pelanggaran Syari'at Islam serta menggiring masyarakat menuju ketaatan mutlak kepada Sang Pemilik Alam Semesta. Dibutuhkan partisipasi semua elemen masyarakat, media massa cetak dan elektronik, organisasi massa, instansi pemerintah dan juga institusi pendidikan dalam rangka memperkuat gerakan dakwah di Aceh. Dan di sisi lain, juga diperlukan pengaturan mekanisme dakwah, strategi dan metodenya agar kegiatan dakwah dapat mencapai target-target perubahan yang diharapkan, khususnya yaitu mendekatkan ummat dengan Allah Swt sehingga terwujudnya keselihan individu dan keshalihan masyarakat secara kolektif.

Materi dari Referensi yang Shahih dan Tidak Menghasut

Sebagai pendakwah tentu terikat dengan aturan-aturan. Aturan ini setidaknya berdasarkan pada bagaimana

²³ Mawardi Siregar, *Mendakwahi Orang-Orang Yang Sudah Percaya: Pembentukan Perilaku Sosial Masyarakat Nelayan Pesisir Kuala Langsa Propinsi Aceh*, Jurnal Dakwah, Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013, hal: 135

penyelenggaraan dakwah di masa Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memastikan agar kegiatan dakwah betul-betul memberi efek terjadinya perubahan di masyarakat ke arah yang dicita-citakan Islam. Tgk H Sirajuddin mengkritik penyampaian kisah para Nabi yang tidak bersumber dari Nash yang jelas (*sharih*). Oleh sebab itu, para pendakwah selayaknya memperhatikan referensi akurat dari penyampaian isi ceramahnya sehingga tidak justru menyampaikan sesuatu yang tidak memiliki referensi yang kuat. Sementara, narasumber lainnya, yaitu Abu Sufyan mengatakan agar materi dakwah juga harus membetulkan *makhraj* dan tajwid bacaan Alquran umat Islam. Hal ini penting menjadi perhatian karena masyarakat membutuhkan bimbingan terus menerus untuk bisa membaca Alquran dengan benar.

Selain itu, penyampaian materi dakwah diharapkan juga tidak memecah belah masyarakat dengan materi-materi yang menghasut. Hal ini disampaikan oleh Abu Mudi. Menurut Abu Mudi, selama ini dalam penelusurannya ada khatib yang menghasut dengan tujuan “*peu phep gop*” (menjelek-jelekkan orang lain). Contohnya, kata Abu Mudi, yaitu adanya isi khutbah yang menyebut “Dayah kalau sudah ada sekolah maka bukan lagi dayah”. Apa yang disampaikan Abu Mudi seperti ini tentu layak diperhatikan secara serius mengingat mimbar jum’at sesungguhnya mestilah menjadi media yang bisa menyatukan ummat, bukan justru memecah belah. Tidak perlu seorang da’i menggunakan mimbar jum’at untuk menjelek-jelekkan pihak lain. Apalagi menjelek-jelekkan institusi pendidikan Islam seperti dayah.

Khutbah Jum’at Ringkas, Shalat Panjang

Sementara terkait penyampaian Khutbah, Abu Mudi juga menyampaikan mekanisme penyampaian khutbah.

Khutbah Jum'at menurut Abu Mudi hendaknya disampaikan tidak lebih dari 10 menit, dan untuk shalat agar diperpanjang sampai 15 menit. Jadi, bukan sebaliknya Hal ini, kata Abu Mudi adalah berdasarkan keterangan dari sejumlah kitab. Maka bagi Imam shalat disarankan agar bisa menguasai surat-surat Alquran yang panjang. Sementara untuk khatib harus mengusahakan khutbahnya agar ringkas. Jikapun khatib ingin berinteraksi panjang lebar dengan jamaah, maka bisa mengambil waktu sebelum atau setelah shalat jum'at.

Terkait dengan isi materi dakwah, Abu Mudi mengusulkan agar materi dakwah yang disampaikan atau disusun pengurus Masjid mestilah berjenjang, seperti halnya isi kitab-kitab yang memiliki bab-bab pembahasannya. Maka penyelenggaraan dakwah juga harus memenuhi tuntutan itu agar para jamaah memperoleh gambaran yang komprehensif tentang luasnya ajaran Islam. Maka materi dakwah harus berjenjang, baik Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Abu Mudi juga mengusulkan agar materi dakwah memperhatikan kondisi masyarakat dimana dakwah itu disampaikan.

Konten Materi Sesuai Kondisi dan Kebutuhan Jama'ah

Para pendakwah harus memperhatikan problematika apa yang menimpa masyarakat. Para da'i, kata Abu Mudi, harus memilih tema yang tepat sesuai dengan kondisi dan tingkat masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Bedah masalah di masyarakat yang keliru dipahami, dan bedah dengan penjelasan keilmuan yang argumentatif dan punya referensi. Maka seorang penceramah, kata Abu Mudi, haruslah menguasai materi yang akan disampaikan, harus betul-betul mempelajari dulu apa yang akan disampaikan untuk memberikan pencerahan kepada jamaah.

Jadi tidak hanya memadai dengan pengetahuan lama. Penceramah juga dituntut untuk terus belajar dan mengkaji.

Hal senada diutarakan Tgk Amarduna Mustafa, menurut beliau, pendakwah jangan pelucu (*ureung meukat ubat*), dan jangan Pendakwah jangan sengaja mencari perhatian untuk melucu seperti sering disaksikan selama ini. Diharapkan juga agar seorang pendakwah mestilah memiliki ilmu agama.

Terkait hal ini, Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab mengatakan bahwa pengembangan materi dakwah harus inkulsif (terintegrasi tiga nilai, keadilan, ihsan, dan *syafaqah 'aladdin* (menyayangi agama)). Inilah tugas ulama. Sasaran dakwah juga harus inklusif, harus masuk ke semua level, dengan materi dan cara yang sesuai dengan masing-masing kelompok tersebut. Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab menyampaikan:

“Da’i ada kelemahan, maka kaji apa saja yang harus diperkuat pada diri da’i. Materi yang ada pada mereka itu kapasitasnya untuk siapa. Contoh waktu khutbah jum’at, disitu ada jamaah dari kalangan penguasa, pengusaha, masyarakat awam. Apa yang harus diperbaiki oleh penguasa, apa yang harus dilakukan oleh pengusaha, masyarakat awam dan sebagainya ketika mereka bertanya apa yang harus saya lakukan untuk agama agar hidup saya bernilai ibadah dengan posisi saya saat ini?”

Jadi, menurut ulama dayah, penyampaikan dakwah dari mimbar masjid harus dapat menjawab kebutuhan jama’ah dalam posisinya masing-masing. Nilai-nilai dakwah harus menjawab kebutuhan atas profesi mereka agar mereka dapat menjalani profesinya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jangan Pertajam Khilafiyah

Tgk H. Sirajuddin Hanafi juga menyampaikan agar para penceramah tidak mempertajam khilafiyah. Urusa Khilafiyah

menurut Tgk Sirajuddin sebaiknya tidak dibicarakan dibicarakan di depan publik oleh penceramah, kecuali ia betul-betul sudah mampu. Tentu ini sangat beralasan mengingat permasalahan Khilafiyah cukup sering menimbulkan kekisruhan di tengah-tengah masyarakat atau jama'ah. Masih terkait dengan materi dakwah, seorang narasumber penceramah, pengajar dan juga Guru di Dayah Modern, yaitu Tgk Ahmad Fauzi mengutarakan pentingnya Aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah Asy'ariyah dan Maturidiyah dijaga di Aceh oleh sebab sejak dulu Aceh telah menganut mazhab ini dalam bidang aqidah.²⁴

Realita selama ini kata Tgk Ahmad Fauzi banyak penceramah yang menyampaikan dakwah bertentangan dengan Aqidah Ahlusunnah. Oleh sebab, Tgk Ahmad Fauzi mengusulkan agar seorang pendakwah harus memberikan penjelasan tentang kesesatan paham-paham di luar Ahlusunnah wal jama'ah, tujuannya yaitu agar masyarakat jangan sampai tergelincir dari paham Ahlusunnah wal Jama'ah. Hal senada juga disampaikan Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab, seorang ulama di Bireuen. Menurut beliau boleh saja diberikan izin kepada penceramah dari luar kalau ia memenuhi syarat-syarat sebagai pendakwah dan menghormati apa yang sudah ditetapkan di Aceh.

Strategi Penyelenggaraan Kegiatan Dakwah di Dalam Masjid

Di antara hal yang perlu mendapat pengaturan dalam kaitannya dengan Masjid sebagai pusat kegiatan dakwah yaitu agar mimbar Jum'at tidak dijadikan arena kampanye kelompok politik tertentu. Selama ini, menurut Abu Mudi, di Aceh tidak jarang Mimbar Jum'at menjadi arena kampanye saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Masukan

²⁴ Wawancara dengan Tgk. Ahmad Fauzi berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2017 di Keude Lhokseumawe, depan Masjid Baiturrahman.

Abu Mudi semacam ini tentu memiliki latar belakang kejadian dan fakta di lapangan dimana masjid dijadikan sebagai arena kampanye. Abu Mudi juga menyampaikan, masjid-masjid dan atau pengurus Masjid tidak perlu phobia dengan amalan sunnat di masjid, sebab terdapat Hadis Nabi yang berbunyi: “Senantiasalah umatku untuk amalan sunat”. Terkait dengan pembangunan masjid, dimana posisi masjid sebagai pusat dakwah. Abu Mudi Mengusulkan agar pemerintah haruslah menangani perihal pendirian masjid. Sebagai contoh yang perlu diperhatikan, yaitu berapa desa yang seharusnya masuk dalam sebuah masjid. Abu Mudi mengingatkan agar jangan sampai di satu desa terdapat dua masjid. Sementara itu, seorang tokoh ulama di Matangkuli, yang juga seorang pendakwah, yaitu Abu Sufyan, beliau mengusulkan agar setelah shalat wajib di masjid-masjid bisa diisi dengan pembacaan hadis. Intinya, menurut Abu Sufyan, perlunya memanfaatkan waktu selesai shalat untuk kegiatan dakwah meskipun dalam waktu yang ringkas mengingat inilah momentum masyarakat berkumpul. Jadi diharapkan agar pengurus Masjid harus melaksanakan kegiatan semacam ini.

Menyampaikan Prinsip Politik dan Ekonomi Islam

Menurut Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab, dalam politik realitasnya terdapat kezaliman-kezaliman dan penyimpangan. Maka oleh sebab itu, melarang kezaliman di atas mimbar adalah keharusan. Di atas mimbar bicaralah untuk melawan kezaliman, penegakan ketidak adilkkan, menghancurkan kezaliman. Ini wajib disampaikan. Sampaikan agama. Jadi bahasan politik yang disampaikan bukan untuk kepentingan politik, tapi merupakan kekuatan untuk menghancurkan kezaliman, bukan untuk menghancurkan lawan. Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab mengatakan:

“Jadi menyampaikan dakwah tentang politik yang idealnya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan agama. Hal seperti ini bukan mendakwahkan politik partisan, melainkan mendakwahkan keadilan yang harus ada dalam politik, mendakwahkan kezaliman yang harus dijauhan dari politik.

Selain memanfaatkan fungsi mimbar untuk dakwah politik yang bukan mengarah ke partisan, Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab juga mengatakan perlunya mendakwah ekonomi Islam. Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab mengatakan:

“Begitu juga bagaimana memfungsikan mimbar untuk mendakwah ekonomi agar menjadi kekuatan dakwah, ilmu dan sebagainya. Kalau dakwah tidak integratif, maka akan banyak lahan yang kosong yang akan menjadi penyakit bagi masyarakat bahkan juga menjadi daya penghancur bagi agama.”

Menurut beliau, ini juga dipahami sesuai dengan prinsip dakwah yang integratif. Fakta di lapangan saat ini, kata Tgk. H. Muhammad Yusuf, dalam masyarakat kita akan dapati di antara mereka satu kelompok yang mencari sendiri ilmu agama, sementara kelompok lainnya, dengan ada sedikit dorongan dia baru akan mencari ilmu agama (dakwah). Kelompok berikutnya baru akan mencari jalan kebenaran kalau ada dorongan yang betul-betul massif dan sistemik. Kalau ketiga ini adalah mayoritas. Maka disinilah dibutuhkan kekuatan kekuasaan, maka kekuasaan saat ia bergerak maka harus bergerak dengan sistem. Maka lahirkan sistem supaya kekuatan mereka difungsikan untuk mendorong kegiatan dakwah.

Perlunya Kehadiran Pemerintah di Semua Tingkatan

Instansi Pemerintah di Semua Level Harus Perkuat Dakwah

Ulama-ulama dayah di Aceh berharap kehadiran pemerintah untuk memperkuat dakwah Islamiah di Aceh. Para ulama menganggap bahwa tanpa kehadiran pemerintah maka dakwah Islamiah untuk memperkuat Syariat Islam di Aceh tidak akan berjalan maksimal. Tgk Muniruddin misalnya, beliau mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan pengajian yang diselenggarakan oleh para ulama di berbagai wilayah di Aceh sesungguhnya merupakan kegiatan dakwah yang paling nyata. Dan selama ini, menurut Tgk Muniruddin, pengajian yang dibuat di masyarakat selama ini telah mampu memberikan efek nyata perubahan di masyarakat. Maka pengajian itu adalah kegiatan dakwah. Contohnya kata Tgk Muniruddin yaitu seperti Tastafi, *Sirul Mubtadiin* dan sebagainya. Seperti pengajian Tastafi kata Tgk Muniruddin, selama ini Tastafi bergerak menawarkan konsep untuk ummat yang berstandarkan Tauhid, sehingga masyarakat bisa hidup dengan mengerjakan standar amalan minimal, tasawuf dan fiqh dalam setiap aktivitas di masyarakat. Pentingnya pengajian ini, Tgk Muniruddin mengatakan sebagai berikut:

“Pentingnya pengajian ini karena ia memberikan ilmu kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip dakwah. Jadi, intinya, apapun yang dibuat oleh masyarakat luas haruslah diawali oleh ilmu sebelum berbuat, niat ketika berbuat (Fiqh), sabar saat berbuat (Tasawuf) dan kemudian ikhlas”.

Maka peranan dakwah semacam ini sangat urgen diterapkan dalam masyarakat muslim. Apalagi, seperti dijelaskan di atas, Aceh yang sedang berupaya menerapkan

Syari'at Islam secara kaffah, maka kebutuhan terhadap penguatan dakwah yang massif dan berkesinambungan adalah suatu keniscayaan. Agar Syari'at Islam di Aceh terus berkembang, maka kegiatan dakwah harus berjalan massif dan maju dengan melibatkan pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Seluruh Instansi pemerintah, institusi pendidikan di semua levelnya, diharapkan menjadi pelopor dakwah Islamiyah, minimal di ruang lingkup dan level masing-masing.

Kehadiran pemerintah Aceh dalam upaya memperkuat dakwah Islamiyah merupakan sebuah keniscayaan. Bagi pemimpin sendiri, sebenarnya tugas antara kepemimpinan dan tugas da'i dapat dilakukan sekaligus.²⁵ Rasulullah Saw adalah teladan paripurna mengenai perihal ini. Beliau bukan saja seorang Rasul, namun juga pemimpin “pemerintahan” yang menjadikan dakwah sebagai “nafas” kekuasaan. Hal demikian juga diterapkan oleh para Khulafaurrasyidin, hingga khalifah-khalifah berikutnya dalam berbagai imperium Islam, seperti Bani Umawiyah, Bani Abbasiyah, Andalusia, Ottoman hingga Kerajaan Aceh Darussalam. Kegiatan dakwah selalu menjadi fokus perhatian mereka. Pada masa Khulafaurrasyidin misalnya, telah banyak muncul organisasi negara yang dikelola secara baik, yang merupakan pendukung dakwah Islamiyah. Sebutan organisasi pada masa ini adalah *an-Nidham*, yang memiliki infrastruktur dan struktur organisasi yang telah terorganisir dengan baik.²⁶

Sebagai contoh misalnya, sejarah Aceh menunjukkan adanya perhatian besar para Sultan Aceh terhadap pengembangan dakwah Islamiyah di Aceh sehingga Islam menjadi pusat dakwah Islamiyah. Bahkan, kuatnya

²⁵ Bahri Ghazali, *Dakwah Komunikatif, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1987), hal: 36.

²⁶ M. Munir dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Rahmat Semesta, 2009), hal: 60

penyelenggaraan dakwah di masa Sultan Iskandar Muda, sehingga ikut juga diatur tentang larangan masuknya aliran-aliran kelompok yang 72²⁷ di luar Ahlusunnah wal Jama'ah ke Aceh.²⁸

Seluruh narasumber menyatakan pentingnya keterlibatan ekstra pemerintah Provinsi maupun Kabupaten kota khususnya dalam penyelenggaraan dan menyukseskan kegiatan dakwah di Aceh. Utamanya, aspirasi itu disampaikan mengingat selama ini minimnya peran dan partisipasi pemerintah dalam kegiatan dakwah di instansinya masing-masing. Menurut Abu Sufyan, pentingnya peran pemerintah dalam aktivitas dakwah di semua instansi khususnya dan di semua elemen masyarakat umumnya adalah karena dakwah merupakan jantung umat Islam. Kalau denyut nadi jantung berhenti, kata Abu Sufyan, maka Islam akan mati. Dalam hal ini, Tgk Amarduna Mustafa mengatakan bahwa aparatur pemerintahan di semua instansi harus menyukseskan kegiatan dakwah dan jangan lepas tangan seperti yang sering terjadi selama ini. Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab menyampaikan bahwa selama ini realitasnya belum semua pihak terlibat atau dilibatkan dalam kegiatan dakwah di masyarakat. Akibatnya banyak terjadi kerusakan-kerusakan di masyarakat oleh karena pergerakan dakwah masih parsial, belum menyentuh semua sendi kehidupan.

Menurut Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, dakwah harus masuk ranah pemerintahan. Sebab, dakwah bukan sekedar ilmu, bukan sebatas aktivitas *ta'lim* (lisan), namun juga terkait dengan pentingnya faktor pendukung dari semua pihak. Selama ini kata Tu Sop, dakwah kelompok ulama cenderung

²⁷ Berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw bahwa umat Islam akan terpecah dalam 73 kelompok, dan hanya satu yang selamat, yaitu yang mengikuti Sunnah Rasul dan sahabat (jama'ah).

²⁸ Lihat *Qanun Meukuta Alam Al-Asyi*, terj. Kalam Daud dan TA Sakti, (Banda Aceh: Unsyiah, 2009), hal:

hanya dalam ranah dakwah ilmu. Adapun dakwah kekuatan, ekonomi, jabatan dan kekuasaan sebenarnya sangat dibutuhkan. Disinilah diutuhkan kekuasaan untuk memfungsikan semua hal tersebut menjadi kekuatan dakwah. Kelemahan-kelemahan ini yang perlu diperkuat.²⁹ Jadi. Intinya menurut Tu Sop, perlunya melibatkan semua pihak dalam kapasitas masing-masing, sehingga menjadi kekuatan dakwah. Kalau kita berharap dakwah dari keilmuan saja, maka ini ada kelemahan. Lalu siapa yang akan sempurnakan?

Adapun soal strategi, kata Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab Strategi pelibatan semua pihak tersebut dalam kegiatan dakwah, misalnya menjadikan kepemimpinan struktural menjadi kekuatan untuk pergerakan dakwah secara konstitusional. Menurut Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, tugas penguasa adalah untuk menggiring semua potensi menjadi kekuatan dakwah. Kekuasaan dijalankan dengan memfungsikan kekuatan dari tingkat atas sampai tingkat bawah menjadi kekuatan dakwah. Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab menerangkan, saat semua kekuatan menjadi kekuatan dakwah maka harus dimengeri setiap bentuk kekuatan tersebut. Orang yang mengerti tentang ekonomi, maka dia harus mengeri peran ekonomi untuk dakwah. Orang yang punya ilmu harus mengerti bagaimana memfungsikan ilmu untuk kegiatan dakwah. Dunia kesehatan juga harus menjadi kekuatan dakwah. Integrasikan semua bidang kehidupan dalam nilai-nilai kebaikan, yang wajib dan sunat. Pada intinya, kata Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, rumus dasar pemikiran yaitu pastikan seluruh bidang kehidupan umat Islam terintegrasikan nilai-nilai Islam di dalamnya, meskipun itu bukan ibadah *mahdhah*. Mislanya amalan, sikap, pemikiran dan lain-lain.

²⁹ Wawancara pada tanggal 17 Oktober 2017 di Rumahnya di Komplek Dayah Babussalam Al-Aziziyah, Jeunieb, Bireuen.

Pengajian di Seluruh Tingkat Instansi pemerintah

Sebagai wujud partisipasi langsung pemerintah dalam kegiatan dakwah, khususnya dalam rangka mengisi pengetahuan aparatur pemerintahan dengan keilmuan Islam, maka Abu Mudi menyerukan di kantor-kantor pemerintah agar dibuatnya pengajian untuk para pegawainya. Begitu juga kantor swasta. Sebab, pembinaan religiusitas pegawai dan karyawan adalah tugas atasan. Dalam Islam kita diajarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Pengajian yang dibuatnya di instansi pemerintahan maupun swasta bukan saja penting karena kewajiban agama, namun juga dalam rangka mewujudkan instansi pemerintahan yang bersih, transparansi dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sering dikeluhkan bangsa kita dari dulu. Menurut Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab, khusus kepada instansi pemerintah agar menyelenggarakan kegiatan dakwah dengan materi yang sesuai dengan profesi pegawai di instansi tersebut dan dengan bahasan-bahasan yang kontekstual dengan problem kekinian yang dihadapi para pegawai di instansi tersebut.

Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah Saw, "*Khatibunnas 'ala hasabi 'uquulihim*". Prinsip-prinsip dasar ajaran Islam berkaitan dengan profesi pegawai di instansi tersebut harus disampaikan para penceramah. Dalam hal ini, kata Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab, MPU dan Dinas Syariat Islam mesti mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah untuk menyelenggarakan dakwah di satu sisi, dan untuk menyesuaikan materi dakwah dengan profesi para pegawai. Selain itu, Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab juga menyampaikan perlunya menghidupkan pengajian-pengajian di Desa-desa di seluruh Aceh dalam rangka mengisi kekosongan wawasan agama Islam di masyarakat. Di desa misalnya, perlunya adanya kebijakan pemerintah agar kegiatan dakwah

bisa menjadi program dari kepala desa dan perangkatnya. Begitu juga ditingkat kecamatan dan kabupaten. Dalam hal ini pengajian merupakan langkah awal yang bisa dilakukan. Begitu juga pengamalan.

Menurut Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, ketika ulama atau da'i ingin mengajarkan banyak orang/masyarakat, maka bagaimana menghadirkan objek dakwah diperlukan keterlibatan pihak lain, dalam hal ini dibutuhkan kehadiran kekuasaan, yaitu perangkat pemerintah di semua levelnya, dari tingkat atas sampai tingkat bawah, bagaimana memfunngsikan mereka sesuai kapasitas masing-masing. Misalnya hari ini orang dinas syari'at Islam datang ke instansi lain, apakah Dinas Syari'at Islam bisa mendakwahkan instansi lain? Sulit. Maka perlu keterlibatan pimpinan mereka di instansi tersebut, karena mereka tidak akan terlubat kalau atasannya tidak terlibat. Begitu juga persoalan di desa, dibutuhkan keterlibatan aparatur desa, dan pemerintah harus memberikan penekanan.

Menurut Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, jangan sampai untuk cari jamaah dibebankan kepada da'i –da'i dan penceramah, sebab faktanya yang tidak berkiblat kepada ulama itu banyak. Misalnya, kata Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab, tugas memberantas Narkoba, siapa yang akan halangi ketamakan para bandar narkoba dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam peredaran Narkoba? Maka pergerakan dakwah harus seimbang. Tetapi dalam pelaksanaannya, kalau tidak ada orang yang ahli, maka sulit juga.

Beliau juga berharap agar Camat dapat menjadi sebagai penggerak dakwah bagi para Keuchik (kepala desa), begitu juga bupati harus menjadi penggerak dakwah oleh para camat. Pihak-pihak ini menurut Tgk H Muhammad Yusuf A. Wahab harus menyadari bahwa kegagalan agama di masyarakat juga merupakan kegagalan pemerintahan. Ukuran sukses pemerintahan bukan hanya pada pembangunan fisik, tapi juga pembangunan bidang agama. Menurut Tgk H

Muhammad Yusuf A. Wahab, selama pemerintah tidak memfungsikan kekuasaan untuk penguatan dakwah maka selama ini pula kerusakan akan terus terjadi.

Tgk Muniruddin mengusulkan agar perlunya pemerintah mensupport masyarakat yang sudah terpengaruh oleh dakwah Islamiyah. Tujuannya, kata Tgk Muniruddin yaitu agar dia tetap dalam hidayah dan kebaikan, dan jangan kembali lagi pada kehidupan yang jauh dari kebaikan (kemaksiatan). Dalam rangka menyukkseskan kegiatan dakwah, Tgk Sirajuddin menyarankan dibuatnya Forum Koordinasi Penceramah dibawah pimpinan ulama. Tujuannya, menurut Tgk Sirajuddin yaitu untuk mengingatkan penceramah yang menyimpang dari ketentuan, atau memiliki potensi penyimpangan. Dan agar supaya kegiatan dakwah terpetakan dengan baik sehingga memudahkan dalam penyusunan strategi dan perencanaan, maka Tgk Muniruddin Kira mengusulkan agar setiap wilayah harus punya peta dakwah di daerah masing-masing sehingga pemerintah tahu masalah dan cara mengobatinya. Dalam hal ini, pemerintah disarankan bisa kerja sama dengan Ormas-ormas Islam, santri, mubaligh dan sebagainya. Masukan ini disampaikan Tgk Muniruddin karena selama ini penyelenggaraan dakwah seperti tanpa strategi dan perencanaan. Dalam hal ini, Tgk Munirddin menyarankan agar pemerintah bisa memantau keadaan ummat. Tgk Muniruddin mengatakan: “Kalau mereka sudah baik, maka dipertahankan. Kalau belum baik, nah bagaimana agar baik”.

Menghentikan Aktivitas Saat Azan Berkumandang

Banyak ulama yang kegelisahannya mengutarakan realitasnya banyaknya ummat yang abai dari kewajiban shalat saat Adzan dikumandangkan. Baik di Kedai Kopi dan sebagainya. Misalnya seperti disampaikan Abu Mudi, di Kedai Kopi banyak yang tidak shalat pelanggannya, maka pemilik Kedai Kopi dan Pemerintah khususnya harus perintahkan

jajarannya untuk tutup warung-warung kopi saat Adzan berkumandang. Hal senada disampaikan Abu Sufyan, menurut beliau, Saat shalat harus hentikan aktivitas apapun dan agar masyarakat semuanya bergegas menuju Masjid. Terkait dengan hal ini, ulama lainnya, yaitu Tgk. H. Muhammad Yusuf A. Wahab mengatakan, Warung Kopi boleh ditutup saat azan agar tidak terbukanya pintu pelanggaran (meninggalkan shalat), tapi harus seimbang dengan kekuasaan, jangan sampai orang yang bisa didakwah dengan lembut tapi didakwahkan dengan kekuatan. Intinya, beliau ingin pendekatan lain juga dilakukan karena manusia memang ada yang perlu dipaksa untuk shalat, namun ada juga yang perlu pendekatan lain.

Penutup

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama dayah di Aceh memandang pentingnya izin bagi pelaksanaan dakwah dan perlunya keteladanan dari para pendakwah. Tujuannya adalah agar pelaksanaan dakwah Islamiyah dapat memberikan hasil yang maksimal, khususnya dalam rangka penguatan Syari'at Islam di Aceh. Selain itu, penyajian materi dakwah juga diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan juga hendaknya menjauhi provokasi dan tidak mempertajam khilafiyah. Begitu juga, para pendakwah perlu memperhatikan penggunaan metode dalam berdakwah. Selain itu, keterlibatan ekstra dan kontrol pemerintah menurut ulama dayah juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan dakwah Islamiyah. Kegiatan dakwah harus dihidupkan di semua tingkatan pemerintahan. Sebab, dakwah Islamiyah adalah janutung bagi denyut nadi eksistensi umat Islam. Maka tanpa peran pemerintah, dakwah akan melemah. Syari'at Islam akan ikut melemah.

Daftar Pustaka

Masyhur, Syaikh Musthafa. *Fiqh Dakwah*, terj. Abu Ridho dkk, Jakarta: Al-I'tishom, 2000.

Jasafat dkk, *Dakwah, Media Aktualisasi Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov. Aceh, 2011.

Malim, Misbach. *Dinamika Dakwah dalam Perspektif Alquran dan Sunnah*, Jakarta: Media Dakwah, 2005.

Azizi, M. Ali. *Ilmu Dakwah*, Edisi I, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ghozali, Bahri. *Dakwah Komunikatif, Membangun Kerangka Dasar Ilmu Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1987.

Munir, M. dan Ilahi, Wahyu, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Rahmat Semesta, 2009.

Qanun Meukuta Alam Al-Asyi, terj. Kalam Daud dan TA Sakti, Banda Aceh: Unsyiah, 2009.

Arifin, M. *Psikologi Dakwah; Suatu Pengantar Studi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Al Bayanuny, Syekh Muhammad Abu Al Fatah. *Ilmu Dakwah: Prinsip dan Kode Etik Berdakwah Menurut Alquran dan As Sunnah*, terj. Dedi Junaedi, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.

Tasmara, Toto. *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Marzuki, *Berebut Masjid: Resistensi Dan Penolakan Masyarakat Islam Lokal Di Aceh Terhadap Aliran Islam Pendatang*, Jurnal PENAMAS, Volume 29, Nomor 3, Oktober-Desember 2016.

Maimun Yusuf, *Strategi Dakwah Bagi Masyarakat Gampong*, Jurnal Mentari Unmuha, Vol. 12, No 1, 2009.

Mawardi Siregar, *Mendakwahi Orang-Orang Yang Sudah Percaya: Pembentukan Perilaku Sosial Masyarakat*

Nelayan Pesisir Kuala Langsa Propinsi Aceh, Jurnal Dakwah,
Vol. XIV, No. 1 Tahun 2013.